

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Jaminan kesehatan nasional di RSJD Abepura secara umum sudah berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan Jaminan kesehatan nasional di RSJD Abepura dapat dilihat dari beberapa variabel implementasi menurut teori Isi Kebijakan dari Merilee S. Grindle berikut ini :

##### 1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

###### a. Kepentingan-kepentingan Yang Mempengaruhi

Dalam indikator ini ada beberapa pelaksanaan pendistribusian dalam kebijakan Jaminan kesehatan nasional yaitu pelaksanaan pendataan, penetapan dan penyerahan Jaminan kesehatan nasional bagi pasien jiwa yang kurang mampu.

###### b. Tipe Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari kebijakan jaminan kesehatan nasional ini sangat dirasakan bagi masyarakat pasien jiwa yang kurang mampu. Sebab dengan adanya bantuan dari pemerintah melalui JKN BPJS memberikan kemudahan masyarakat pasien jiwa yang kurang mampu yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.

c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan mengharapkan pasien jiwa yang menerima bantuan dari jaminan kesehatan nasional bisa memanfaatkan sebaik mungkin bantaun tersebut. Sehingga dengan terciptanya hidup sehat maka akan memberikan semangat kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Dari kepala Seksi Pelayanan Medis tidak terlalu serius memikirkan dampak dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan data tidak akurat dikarenakan data lama. Namun masih ada usaha yang dilakukan dari RSJD dalam melakukan verifikasi data untuk memperbaiki data lama guna memastikan tepatnya sasaran dari kebijakan jaminan kesehatan nasional yang akan dimulai pada tahun 2020 ini.

e. Pelaksana Program

Pelaksana untuk kebijakan jaminan kesehatan nasional untuk penerima bantuan iuran adalah penanggungjawab BPJS dan dibantu dengan verifikator. Namun dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa yang belum sesuai prosedur.

f. Sumber-sumber Daya Yang Digunakan

Untuk mengenai sumber daya manusia yang ada di RSJD Abepura memang sudah mencukupi ada yang jadi masalah petugas tersebut tidak selalu ada di kantornya sehingga ada keluhan dari masyarakat atau ada masyarakat yang ingin bertanya tidak kebingungan.

## 2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

### a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan para pelaksana dari kebijakan jaminan kesehatan nasional. Bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan anggota keluarga pasien setempat mengenai sosialisasi yang dilakukan pelaksana dari kebijakan jaminan kesehatan nasional tersebut.

### b. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik lembaga dan penguasa pada RSJD Abepura telah memberikan pengaruh yang cukup besar pada pelaksanaan kebijakan ini. karakteristik lembaga dan penguasa di RSJD Abepura selalu membangun hubungan emosional yang baik dengan pegawai BPJS yang ditempatkan di RSJD Abepura, selain itu juga terbuka dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui penyediaan sarana penyampaian keluhan.

### c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Tingkat kepatuhan para pegawai RSJD Abepura dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Pegawai memiliki komitmen yang tinggi dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya. Pelayanan yang diberikan juga sangat disiplin dan sesuai dengan alur pelayanan yang sudah ditentukan. Pegawai di RSJD Abepura tidak pernah membedakan antara masyarakat lain dengan satunya dalam memberikan pelayanan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan sesuai Implementasi Kebijakan Jaminan kesehatan nasional sebagai berikut :

1. Bagi Manajemen RSJD Abepura agar dapat memberikan informasi tentang prosedur maupun alur pelayanan pada pasien BPJS dengan menggunakan poster agar mudah dimengerti dan dipahami oleh semua pasien BPJS.
2. Pihak pelaksana terutama penanggungjawab BPJS dan verifikator, sebagai pelaksana untuk mendata pasien jiwa yang kurang mampu untuk menerima bantuan dari distribusi program Jaminan kesehatan nasional diharapkan dalam memverifikasi data kalau bisa langsung ambil data langsung ke anggota keluarga pasien dan dinas terkait yang benar-benar membutuhkan dari program tersebut sehingga tidak terjadinya tepat sasaran.
3. Untuk pegawai BPJS dan JKN lainnya terkhususnya untuk RSJD Abepura diharapkan pegawai kesejahteraan sosial selalu ada dikantornya agar masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau masukan bisa dengan mudah mendapatkan informasi.
4. Bagi masyarakat yang belum terdaftar agar segera mengurus menjadi peserta BPJS, sehingga tidak menjadi penghambat dalam pelayanan kesesehatan, sedangkan pada pasien BPJS non PBI diharapkan agar teratur membayar premi < 6 bulan, sehingga tidak menjadi hambatan dan memudahkan peserta mendapatkan pelayanan.